

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang dirumuskan dari deskripsi temuan penelitian dan pembahasan hasil-hasil penelitian dalam Bab IV.

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab IV, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sesuai pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Kesimpulan Umum

Kesimpulan umum penelitian ini adalah bahwa model pengembangan budaya demokrasi konstitusional melalui pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif “*school-based democracy education*” di SMAT KN mengadopsi pola pendidikan dengan penerapan kedisiplinan yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), pendidikan agama, disiplin otoriter (militer), dan pola pengasuhan asrama. Model pengembangan budaya demokrasi konstitusional ini dibangun dalam hal : (a) penguatan persepsi kepala sekolah, guru dan siswa tentang pendidikan demokrasi dan masyarakat sekolah demokratis; (b) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PKn yang mengacu Standar Isi (Permendiknas RI No 22 tahun 2006) dan Standar Proses (Permendiknas RI No 41 tahun 2007), dan dalam batas-batas tertentu mengacu pada sintakmatik pembelajaran demokratis (Joyce dan Weil, 2009); (c) penciptaan kultur sekolah

yang efektif dengan kedisiplinan tinggi, yang diimplementasikan dalam budaya demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, budaya demokrasi dengan kecerdasan, budaya demokrasi yang berkedaulatan, budaya demokrasi dengan “rule of law”, budaya demokrasi dengan pembagian kerja, budaya demokrasi dengan hak azasi manusia, budaya demokrasi dengan pengadilan pelanggaran, budaya demokrasi dengan otonomi tugas, budaya demokrasi dengan kemakmuran, dan budaya demokrasi yang berkeadilan sosial. Pendidikan demokrasi juga dikembangkan di luar kelas dalam bentuk kegiatan OSIS dan ekstra-kurikuler. Selain itu, hal unggulnya adalah pengembangan budaya demokratis dalam sosio-kultur asrama dengan membangun komunikasi antarbudaya dalam keragaman agama, etnis, bahasa, budaya dan latar belakang orang tua siswa, sehingga mampu membentuk harmoni hidup memiliki jiwa “korsa” dan nasionalisme.

2. Kesimpulan Khusus

- a. **Pendidikan demokrasi** menurut persepsi kepala sekolah, guru dan siswa SMAT KN adalah sebagai pemberian ruang kebebasan bagi siswa dalam mengetahui, memahami dan menggunakan hak-hak serta melaksanakan kewajibannya dalam bingkai penerapan kedisiplinan untuk tujuan mencapai visi dan misi sekolah, yakni pilar prestasi akademik, religius dan terampil. Pendidikan demokrasi yang dibangun di sekolah secara konsisten dan kontinyu ini dapat mewujudkan pranata atau tatanan sosial-pedagogis yang kondusif atau memberi suasana bagi tumbuh kembangnya berbagai kualitas pribadi demokratis.

Sedangkan **masyarakat sekolah demokratis** menurut persepsi kepala sekolah, guru dan siswa SMAT KN merupakan komunitas sekolah yang menerapkan nilai-nilai demokratis. Masyarakat sekolah demokratis dapat dibangun dalam dua aspek strategis, yakni : *Pertama*, manajemen sekolah ditandai oleh: (a) Peraturan sekolah dibuat bersama; (b) Kebijakan berproses bottom up; (c) Adanya keterbukaan dan sosialisasi program sekolah; (d) Kebebasan mengemukakan pendapat; (e) Memperbanyak keterlibatan orang dalam kegiatan sekolah (warga sekolah); (f) Memberi keleluasaan peserta didik dalam mengeksplor kemampuan; (g) Sekolah responsif terhadap usulan dan kritik siswa. *Kedua*, dalam proses pembelajaran, demokratisasi dilakukan dengan cara : orientasi siswa (*student centered*); nyaman/menyenangkan, mengangkat permasalahan nyata, guru sebagai fasilitator dan mediator, adanya keleluasaan siswa diskusi, bertanya, dan mengomentari, materi mengacu pada SK/KD yang tepat, metode yang memberi ruang keaktifan siswa (mengurangi ceramah), penilaian dilakukan secara transparan (proses dan hasil).

b. Implementasi Pembelajaran PKn dalam Pengembangan Budaya Demokrasi Konstitusional

- 1) **Perencanaan pembelajaran PKn** untuk tujuan pengembangan budaya demokrasi di SMAT KN Bandung, yakni pengembangan materi, media, metode dan penilaian pada silabus dan RPP mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terumus dalam Standar Isi (Permendiknas No 22 tahun 2006), dan Standar Penilaian (Permendiknas

No 20 tahun 2007). Aspek kompetensi kewarganegaraan yang dikembangkan meliputi “*civic knowledge, civic skill dan civic disposition*”.

- 2) **Pelaksanaan pembelajaran PKn** di SMAT KN dalam batas-batas tertentu telah mengikuti Standar Proses (Permendiknas No 41 tahun 2007), dan karakteristik model pembelajaran demokratis Joyce dan Weil, yakni mencakup struktur, yakni meliputi : pengkondisian awal, pembentukan konseptual, pembentuk kelompok multikultur, kerja kelompok, refleksi dan reinforcement, dan penutup. Pembelajaran telah menciptakan sistem sosial yang demokratis, prinsip pengelolaan yang menunjukkan peran guru sebagai fasilitator, mediator dan pemberi kritik yang baik, ditunjang sistem pendukung yang lengkap, dan dampak instruksional dan pengiring yang baik. Akan tetapi, pembelajaran dan penilaian belum mengeksplor kompetensi siswa dalam mengembangkan berpikir kritis untuk memecahkan isu-isu kewarganegaraan yang kompleks, kontroversial dan nyata, yang dibangun konseptualnya melalui pelibatan siswa dalam kerja sama kelompok. Dengan demikian pembelajaran masih berkuat pada titik “*education about citizenship*”.

Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran PKn yang berbasis demokrasi akan melahirkan dan membentuk sikap dan perilaku siswa yang demokratis.

c. Budaya sekolah dalam pengembangan budaya demokrasi konstitusional di SMAT KN.

- 1) Pengembangan budaya demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa di SMAT KN dikembangkan merujuk pada visi dan misi sekolah untuk memberikan ruh pada kegiatan akademik. Pendidikan agama dirancang untuk memberikan rujukan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini siswa. Nilai-nilai religius dan spiritualitas menjadi landasan penguat (hujah) bagi penerapan kedisiplinan di sekolah dan sosio-kultural asrama dalam mewujudkan budaya tertib dan disiplin. Sehingga *outcome*-nya, siswa dapat menjadi muslim yang taat, mampu mengaji dengan baik, sholatnya benar dan khusuk, serta faham akan nilai dan norma agama.
- 2) Pengembangan budaya demokrasi dengan kecerdasan di SMAT KN ditumbuhkembangkan secara multi kecerdasan yang meliputi intelektual, emosional, kinestetik, sosial dan spiritual. Kecerdasan-kecerdasan itu dikembangkan secara formal-kurikuler di sekolah, pengembangan diri pendidikan agama, dan sosio-kultur kehidupan asrama, yang dibangun dengan dasar kedisiplinan yang tinggi sepanjang hari (*full days*).
- 3) Pengembangan budaya demokrasi dengan kedaulatan di SMAT KN diwujudkan dalam : (1) manajerial umum dan keuangan oleh Yayasan Krida Nusantara (YKN); (2) manajerial teknis kependidikan dilakukan oleh sekolah. Kepala sekolah adalah “top manajerial”, yang dapat memberikan masukan kebijakan kepada yayasan dalam hal pengembangan sekolah. Prose pengambilan keputusan dilakukan “*bottom*

up”, seperti dalam perumusan visi dan misi sekolah. Mekanisme “*staffing*” dilakukan melalui “polling” guru, dan kepala sekolah mensyahkan setelah ada persetujuan “mutlak” dari yayasan. Sekolah memiliki komite sekolah, yang pengurusnya diangkat oleh yayasan, sehingga tersamarkan antara kebijakan komite atau yayasan.

- 4) Pengembangan budaya demokrasi dengan “*rule of law*” di SMAT KN adalah penerapan pola kedisiplinan yang membingkai sistem pendidikan sekolah. Kedisiplinan diciptakan dengan melandaskan pada Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), model disiplin otoriter (militer), ajaran agama dan pola pengasuhan asrama. Berbagai tata tertib dibuat secara detail dan lengkap dengan seperangkat sanksi-sanksi. Siswa berkewajiban mentaati aturan dan konsekuensi ketidaktaatan adalah sanksi.
- 5) Pengembangan budaya demokrasi dengan pembagian tugas di SMAT KN mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan di sekolah. Struktur dan rincian tugas pokok dan fungsi dirumuskan secara lengkap dalam panduan sekolah, yang terdiri dari bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan bidang humas, kecuali bidang sarana dan prasarana yang masih dikelola oleh yayasan.
- 6) Pengembangan budaya demokrasi dengan hak-hak asasi di SMAT KN dilakukan dengan menghargai dan memperlakukan semua siswa tanpa diskriminasi atas perbedaan agama, etnis, budaya dan latar belakang orang tua siswa. Jaminan dan perlakuan yang menjunjung hak-hak asasi ini dilakukan sekolah pada saat awal seleksi masuk, saat pembelajaran

dan di asrama. Semua diposisikan sama dalam melaksanakan aturan, dan dikenai sanksi yang sama pula. Walau dalam batas-batas tertentu siswa tidak diperkenankan berargumentasi atas aturan yang dilanggarnya. Namun tetap siswa difasilitasi kotak saran untuk menampung kritik dan saran siswa atas kehidupan sekolah.

- 7) Pengembangan budaya demokrasi dengan sistem pengadilan di SMAT KN dilakukan sesuai konteks, yakni tingkat manajemen sekolah, maka konflik dan pengambil keputusan atas pelanggaran guru dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemegang hak prerogatif. Dalam tingkatan siswa, dilakukan oleh masing-masing bidang tugas, yakni di asrama ada wali asuh, binsis, dan lurah; di kelas adalah wewenang guru dan BP; dan binsis pada unit-unit kegiatan siswa; kesemuanya menjadi tanggung jawab wakasek kesiswaan.
- 8) Pengembangan budaya demokrasi dengan otonomi tugas di SMAT KN peneliti dapat menyimpulkan bahwa otonomi tugas adalah pendelegasian tugas-tugas kepala sekolah kepada pembantu-pembantunya, yakni wakasek kurikulum, membawahi unit bimbingan belajar, unit pendidikan agama, unit keterampilan, unit perpustakaan, dan unit pengembangan kurikulum; wakasek kesiswaan bertanggung jawab atas unit asrama, unit ruang makan, dan OSIS serta ekstra-kurikuler; wakasek humas tidak membawahi unit-unit kegiatan. Dan yang berkaitan dengan siswa dalam pembelajaran, ada guru mata pelajaran, wali asuh (di sekolah dan asrama), dan BP/BK.

- 9) Pengembangan budaya demokrasi dengan kemakmuran di SMAT KN peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan guru telah layak yang sebanding dengan tugas profesinya di sekolah, dan kondisi latar belakang pekerjaan orang tua siswa pun menunjukkan kemapanan. Kesejahteraan yang layak ini membantu guru dalam meningkatkan profesionalismenya dalam menciptakan struktur dan kultur belajar mengajar yang demokratis.
- 10) Pengembangan budaya demokrasi yang berkeadilan sosial di SMAT KN adalah bentuk penghargaan dan perlakuan sekolah yang tidak diskriminatif terhadap siswa yang beragam agama, etnis, budaya dan latar belakang orang tua (*equal opportunity for all*). Hak-hak siswa dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan, dan siswa dikenai sanksi atas pelanggaran aturan yang ditetapkan.

d. Kendala dan upaya pendidikan demokrasi dalam sosio-kultural di luar kelas

- 1) Kegiatan belajar berdemokrasi di luar kelas, di SMAT KN difasilitasi melalui kegiatan OSIS dan Ekstra-kurikuler. Kegiatan-kegiatan itu diwujudkan dalam memberikan bekal nyata bagi siswa. Pluralitas siswa dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan tantangan sekaligus peluang dalam membangun harmoni komunikasi antarbudaya, antaragama, dan antaraetnis. Selain itu, kelompok kesenian tradisional (KAG) adalah wahana berdemokrasi dalam kesenian untuk membangun jiwa nasionalisme siswa.

- 2) Pengembangan budaya demokrasi dalam sosio kultur asrama di SMAT KN diwujudkan dalam pola hidup bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, saling menghargai keragaman, toleransi dan empati, kerjasama, berbagi (korsa). Komunikasi antarbudaya mampu membangun sikap nasionalisme. Komunikasi antarbudaya, antaraagama, dan antaretnis adalah tantangan sekaligus peluang dalam membentuk harmoni simbiosis mutualisme dalam asrama. Upaya yang dilakukan sekolah untuk itu adalah membuat berbagai kegiatan yang melibatkan semua siswa, dengan pengawasan pamong dan “binsis” asrama, sehingga sosio-kultur demokratis terbangun dalam nuansa kedisiplinan yang tinggi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan pengembangan budaya demokrasi konstitusional di sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan dalam konteks “*school-based democracy education*”, yakni sebagai berikut :

- 1) Kepada Dinas Pendidikan terkait, bahwa tuntutan global abad ke-21 yang berkecenderungan kuat ke arah keharusan pembangunan sekolah demokratis, termasuk tujuan pendidikan nasional (UUSPN No 20 Tahun 2003) adalah membangun warga negara demokratis, memerlukan persepsi yang matang dari para *stakeholder* pendidikan tentang *apa, mengapa dan bagaimana* pendidikan demokrasi dilaksanakan di persekolahan dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang selama ini kurang berjalan dengan baik. Untuk tujuan itu, maka harus dibangun persepsi yang

komprehensif bagi para *stakeholders* pendidikan, yakni : pengawas pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru, tentang pendidikan demokrasi dalam konteks rekonseptualisasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), paradigma *democratic teaching* dan penciptaan budaya sekolah demokratis. *Workshop*, seminar, dan juga *in house training* dengan tema-tema tadi, adalah strategi yang dapat ditempuh untuk meng-*up grade* pengetahuan dan pemahaman para *stakeholders* membangun demokratisasi pendidikan di persekolahan.

- 2) Kepada pihak sekolah, pengembangan SMAT KN sebagai sekolah berasrama (*boarding school*) dengan mengadopsi *mainstream nasionalis-religius*, yang menerapkan pola kedisiplinan ala militer yang dipadukan dengan kegiatan keagamaan, dalam batas-batas tertentu seringkali berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dituntut pelaksanaan manajemen pengelolaan pendidikan dan kultur sekolah secara lentur (*tidak rigid*), efektif dan menerapkan prinsip-prinsip sekolah demokratis secara konsisten. Bahwa untuk tujuan itu harus diterapkan kedisiplinan agar terwujud budaya tertib dan budaya kerja yang tinggi, akan tetapi kedisiplinan harus dibangun di atas dasar-dasar demokratisasi. Sehingga implementasinya tidak menimbulkan "*pseudo demokrasi*".
- 3) Kepada para guru PKn, bahwa SMAT KN adalah sekolah yang multikultur, memiliki keragaman siswa dalam hal agama, etnis, dan budaya. Maka pembelajaran yang dibangun atas dasar keberagaman dan penghormatan serta penghargaan terhadap hak-hak keragamannya, adalah merancang dan

melaksanakan pendidikan multikultur. Pendidikan multikultural ini dapat melatih dan membangun karakter siswa mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka. Pendidikan multikultural memiliki posisi strategis dalam memberikan sumbangsih terhadap penciptaan perdamaian dan upaya penanggulangan konflik. Sebab nilai-nilai dasar dari pendidikan ini adalah penanaman dan pembumihian nilai toleransi, empati, simpati dan solidaritas sosial. Pendekatan *integrated learning* dan *cooperative learning* adalah beberapa model pendekatan yang efektif dalam memasukkan pendidikan multikultural ke dalam PKn di kelas. Pembelajaran berbasis portofolio (*portfolio-based learning*) merupakan alternatif utama guna mencapai visi dan misi pembelajaran tersebut. Portofolio dalam pembelajaran PKn adalah kegiatan pembelajaran dengan mengumpulkan informasi/data, kemudian disusun dengan baik, yang menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan isu-isu kebijakan publik (*public policy*). Sintakmatik pembelajaran portofolio ini ditempuh melalui enam tahap kegiatan sebagai berikut : Tahap I: Mengidentifikasi masalah kebijakan publik di masyarakat; Tahap II:Memilih satu masalah untuk kajian kelas; Tahap III : Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas; Tahap IV: Membuat portofolio; Tahap V: Menyajikan portofolio; Tahap VI: Refleksi terhadap pengalaman belajar. Dalam pembelajaran PKn yang berbasis portofolio, kelas dibagi ke dalam empat kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian portofolio kelas. Setiap kelompok memiliki tugas

berbeda, namun dari mulai kelompok satu sampai keempat harus saling terkait (*sekuensial*) dan merupakan satu kesatuan.

- 4) Untuk penelitian berikutnya, bahwa SMAT KN adalah sekolah bersrama yang mengadopsi pendekatan *nasionalis-religius*. Ada juga sekolah berasrama yang mengadopsi pendekatan *nasionalis* dan *religius*, untuk itu, agar dapat dilakukan penelitian sejenis untuk sekolah-sekolah seperti itu. Sehingga diperoleh data dan kesimpulan akurat tentang pendekatan sekolah mana (*nasionalis, religius, atau nasionalis-religius*) yang efektif membangun sekolah demokrasi yang berkonstitusional Indonesia.

